

**MEMBANGUN TRUST PUBLIK MELALUI AKUNTABILITAS: Model
Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan Dasar di SD Islam Al Fatih
Paguyangan**

Muhammad Ja'far Sidiq¹, Dhiyah Eko Sulistiowati², Prof. Sutrisno³
^{1,2,3} Universitas PGRI Semarang

[1 jafarsidiq320@gmail.com](mailto:jafarsidiq320@gmail.com), [2 adindasulistyo83@gmail.com](mailto:adindasulistyo83@gmail.com), [3 sutrisno@upgris.ac.id](mailto:sutrisno@upgris.ac.id),

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of school financial accountability in increasing the transparency of education fund management at SD Islam AL Fatih Paguyangan. The approach used is qualitative descriptive with the type of case study. Data was collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation of school financial practices, including the use of Education Unit Operational Assistance (BOSP) funds, community donations and donations from outside parties. The results of this study show that schools have implemented the principle of accountability through structured financial records, regular reporting in financial meetings (monthly and mid-school year), online reporting to the government, and the active involvement of school committees and guardians in financial evaluations. Transparency in the use of social funds such as donations or donations strengthens public trust. In this study, it is shown that financial accountability is not only an administrative obligation, but also a means of building active community participation and supervision. This study recommends improving the digitalization system of reporting and training of human resources to improve the efficiency and accountability of school finances.

Keywords: *Transparency; Financial Accountability; BOSP Fund; School Financial Management; Public Participation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas keuangan sekolah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan di SD Islam AL Fatih Paguyangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap praktik keuangan sekolah, termasuk paoran penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sumbangan masyarakat dan donasi dari pihak luar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pencatatan keuangan yang terstruktur, pelaporan rutin dalam rapat keuangan (bulanan dan pertengahan tahun pelajaran), pelaporan online ke pemerintah, serta keterlibatan aktif komite sekolah dan wali murid dalam evaluasi keuangan. Transparansi terhadap penggunaan dana sosial seperti donasi atau sumbangan memperkuat kepercayaan publik. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang dilakukan tidak hanya kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana membangun partisipasi dan pengawasan Masyarakat secara aktif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem digitalisasi

pelaporan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan sekolah.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas Keuangan, Dana BOSP, Manajemen Keuangan Sekolah, Partisipasi Publik.

A. Pendahuluan

Menurut Suhelyanti (2020) pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak di sokong oleh pengelolaan yang baik, pada saatnya pun akan menjadi tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan, dimana pendidikan harus memahami ilmu manajemen baik dari segi sumberdaya manusia maupun dari sumber daya potensi yang ada di lembaga tersebut. Pendidikan harus menempatkan manajemen sebagai suatu prioritas dalam praktik sebuah lembaga pendidikan, jika tidak maka pendidikan akan berjalan tidak baik (Sukarman, 2021).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan bukan hanya soal memastikan dana di sekolah dikelola secara tepat, tetapi juga menjaga tanggung jawab moral terhadap seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak

yang berkepentingan, baik secara administratif maupun sosial. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memainkan peran sentral dalam efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sudyartini & Wafa, 2024).

Pada pelaksanaan manajemen pembiayaan sekolah dilakukan dengan mengacu pada empat prinsip yaitu keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Keadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan (pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat) disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Efisiensi lebih mengarah pada perbandingan antara masukan dengan keluaran. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah, baik dari segi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya dan pertanggungjawabannya semua

harus jelas. Akuntabilitas publik berarti penggunaan keuangan sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang telah diterapkan (Harmino, 2014:59).

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi transparansi dan akuntabilitas secara simultan berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan BOS hingga lebih dari 80%, seperti yang ditemukan di berbagai sekolah menengah (Rachman et al., 2022; Indah Melati et al., 2024). Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pengawasan internal yang kuat dan keterlibatan eksternal yang terbuka, terutama dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan terkait pembiayaan sekolah. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang sehat dan terpercaya di lingkungan pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan masalah yang sensitif, maka dalam pengelolaan keuangan harus

transparan, teliti, jujur agar tidak timbul kecurigaan dari warga sekolah termasuk masyarakat yang terlibat seperti komite dan orang tua siswa. Ruang lingkup manajemen pembiayaan yaitu: (1) Perencanaan pembiayaan, (2) Penyusunan rencana kerja sekolah (RKS), rencana kerja jangka menengah (RKJM), dan rencana kerja tahunan (RKT), (3) Penggalan sumber – sumber, (4) Pembukaan, (5) Penggunaan sesuai peraturan perundangan, (6) Pengawasan dan pemantauan, dan (7) Pertanggungjawaban dan pelaporan (Ambarita Alben, 2016:49).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat (1) secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan dana pendidikan wajib dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip ini bukan hanya menjadi dasar normatif, melainkan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan, efektif, dan berintegritas. Kesenjangan

antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem manajerial, literasi keuangan, dan pelibatan pemangku kepentingan belum optimal. Sekolah kerap kali menjalankan prosedur pelaporan hanya sebagai bentuk formalitas administratif, tanpa ada proses reflektif atau evaluatif terhadap efektivitas pengelolaan dana yang telah dilakukan. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa prinsip akuntabilitas hanya menjadi simbol, bukan budaya organisasi yang tertanam secara sistemik.

Penelitian yang dilakukan oleh Innanawati et al. (2023) di SMK Negeri 1 Mojosoongo menunjukkan bahwa meskipun praktik transparansi dan pengawasan telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS secara signifikan, aspek akuntabilitas justru belum menjadi perhatian utama dalam struktur manajemen sekolah. Padahal, akuntabilitas merupakan elemen vital dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan transparansi anggaran yang bermakna. studi lain

oleh Indah Melati et al. (2024) di MIM 05 Palirangan menunjukkan bahwa akuntabilitas, meskipun berdiri sendiri tanpa transparansi yang kuat, tetap mampu menghasilkan pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai strategis yang tak tergantikan dalam tata kelola keuangan sekolah. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, akuntabilitas tidak boleh hanya dilihat sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang mencakup pelaporan terbuka, evaluasi berkala, serta pelibatan aktif dari orang tua, komite sekolah, dan masyarakat luas.

Sekolah swasta praktik akuntabilitas keuangan umumnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan internal, seperti kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan dana pendidikan.

Tetapi pada hal publikasi laporan penggunaan dana, termasuk dana BOS maupun dana donatur, masih tergolong minim dan bersifat terbatas pada laporan verbal dalam pertemuan tertentu (Asrul et al., 2023; Musyarafah, 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara komitmen akuntabilitas internal dan kebutuhan transparansi eksternal yang seharusnya menjadi standar bersama dalam tata kelola keuangan pendidikan.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaan akuntabilitas menyeluruh di sekolah-sekolah swasta. Di satu sisi, pihak sekolah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran di hadapan tim internal. Namun di sisi lain, minimnya publikasi melalui media informasi seperti papan pengumuman, buletin sekolah, atau situs web resmi menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan yang mereka dukung. Keterbatasan ini sering kali berasal dari kurangnya

sarana teknologi yang mendukung transparansi atau rendahnya kesadaran akan pentingnya komunikasi publik dalam membangun kepercayaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Asrul et al. (2023), penting bagi setiap lembaga pendidikan untuk tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas administratif, tetapi juga membangun akuntabilitas sosial yang mencakup keterbukaan, dialog, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan sekolah.

Sekolah Dasar Islam Al Fatih (SDI Al Fatih) Paguyangan merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan dasar, yang didirikan oleh yayasan swasta yang berada di daerah pedesaan dengan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang beragam. SD Islam AL Fatih Paguyangan berdiri tanggal 17 Juli 2019 dibawah naungan Yayasan Bangun Bangsa Pakujati dan naungan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, meskipun dasar hukum dan praktik internal sudah ada, masih dibutuhkan upaya sistematis

berupa penerapan aplikasi pelaporan digital, pelatihan untuk pengelola keuangan sekolah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat, agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya jalan formal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menggali secara komprehensif mekanisme akuntabilitas keuangan di SD Islam Al Fatih Paguyangan. Metode ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal, interaksi para pelaku, dan realitas praktik pengelolaan dana sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, bendahara, ketua komite, dan wali murid. Observasi partisipatif dalam pelaksanaan rapat evaluasi keuangan, serta studi dokumentasi yang mencakup buku kas harian, laporan BOSP, dan notulen rapat. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana-dimulai dengan reduksi data,

dilanjutkan dengan penyajian data melalui matriks dan diagram, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperkuat validitas temuan.

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memilih SD Islam Al Fatih Paguyangan sebagai lokasi studi, karena sekolah tersebut memiliki struktur pengelolaan keuangan yang terbuka dan kombinasi sumber dana yang beragam (BOSP, SPP, donasi alumni, sumbangan donatur). Pendekatan ini sesuai dengan metode studi kasus yang telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sekolah dengan variasi sumber pendanaan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap efektivitas mekanisme akuntabilitas (Somantri & Salam, 2021). Penggunaan *purposive sampling* memastikan bahwa informan yang dipilih yakni kepala sekolah, bendahara, ketua komite, dan perwakilan wali murid memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan dan mampu memberikan wawasan

kaya tentang sistem pertanggungjawaban yang berjalan.

Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan indikator utama akuntabilitas keuangan, seperti proses pencatatan, pelaporan, partisipasi publik, dan integrasi teknologi dalam pelaporan keuangan. Instrumen wawancara semi-terstruktur ini dirancang untuk memungkinkan eksplorasi mendalam serta tanggapan reflektif dari informan, sehingga dapat mengungkap dinamika dan hambatan dalam praktik akuntabilitas sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip wawancara kualitatif yang fleksibel namun sistematis, sebagaimana diuraikan dalam studi Nugroho et al. (2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang ada di SD Islam Al Fatih Paguyangan, antara lain kepala sekolah (Johan Efendi, S.Kom. Gr), bendahara sekolah (Inayatul Fitri, S.Pd. Gr), ketua komite (Hj. Wajiah), wali murid (Nur Khayati), dari informan tersebut diperoleh

kesimpulan bahwa sistem akuntabilitas keuangan di sekolah SD Islam Al Fatih Paguyangan telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pencatatan keuangan terstruktur dari penjelasan bendahara sekolah, semua transaksi keuangan dicatat pada buku kas harian dan buku keuangan secara berkala. Sehingga catatan tersebut memuat informasi rinci mengenai pemasukan dan pengeluaran dana, baik yang bersumber dari BOSP, SPP, maupun dana sosial seperti sumbangan dari donator. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pelaporan dan rapat dari penjelasan kepala sekolah dan komite, mengungkapkan bahwa SD Islam Al Fatih Paguyangan melaksanakan dua kegiatan rapat keuangan: (1) Rapat bulanan mencakup laporan kas bulanan dan pengeluaran harian sekolah dan penerimaan dana BOSP (2) Rapat akhir tahun pelajaran, yang bertepatan dengan penerimaan

raport siswa dan dilaksanakan bersama wali murid dan komite untuk menyampaikan laporan akhir keuangan sekolah secara terbuka. Sedangkan pelaporan dana pemerintah BOSP dilaporkan secara langsung melalui sistem digital (online) melalui aplikasi ARKAS. Menurut lin Fitri (Bendahara Sekolah) laporan ini mengikuti format resmi dan menjadi bagian dari Upaya transparansi kepada pemerintah sebagai pemberi dana, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.

Peran komite dan wali murid tidak hanya terlibat dalam perencanaan anggaran, tetapi juga dalam proses evaluasi dan pengawasan. Ketua komite mengaskan bahwa rapat komite menjadi forum penting dalam menjaga senengi antara pihak sekolah dan masyarakat. Dimana walimurid juga rutin diajak rapat mengenai keuangan secara terbuka dan diajak berdiskusi mengenai program pendanaan untuk tahun berikutnya. Walimurid juga dilibatkan dalam penggunaan dana untuk kegiatan sosial, seperti pemberian bantuan atau subsidi

kepada siswa kurang mampu. Dimana keseluruhan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas bukan hanya dijalankan sebagai kewajiban administrative, melainkan juga sebagai wujud kepercayaan sosial yang dibangun secara bertahap dan berkesinambungan antara sekolah dan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan di SD Islam Al Fatih Paguyangan telah dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dan transparan. Dimana mekanisme pelaporan rutin dan pencatatan keuangan yang disiplin menjadi modal utama untuk menjaga kredibilitas keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lubis et al. (2024) mengatakan bahwa akuntabilitas yang baik ditandai oleh keterlibatan aktif bendahara, kepala sekolah dan partisipasi masyarakat melalui kkomite sekolah dalam setiap proses keputusan keuangan. Penggunaan sistem pelaporan melalui ARKAS secara online kepada pemerintah menunjukkan integrasi teknologi dalam proses akuntabilitas. Pada sistem ARKAS

berfungsi mempercepat proses pelaporan serta memudahkan monitoring dari pemerintah, serta menekan kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan dana. Nur & Hanid (2024) menegaskan bahwa digitalisasi laporan keuangan sekolah dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas public terutama jika diikuti oleh pelatihan sumber daya manusia yang memadai.

Kolaborasi antara komite dan walimurid dalam perencanaan dan evaluasi anggaran juga mencerminkan manajemen berbasis masyarakat. Dengan pendekatan berbasis masyarakat diyakini lebih efektif dalam menciptakan rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap kelangsungan program sekolah. Weny (2024), mengatakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan BOS di SMAN 8 Kediri mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap lembaga pendidikan dan mendorong transparansi penggunaan dana.

Keterbukaan terhadap penggunaan dana sosial seperti sumbangan pendidikan menunjukkan bahwa sekolah SD

Islam Al Fatih Paguyangan tidak fokus pada pengelolaan dana formal saja seperti BOSP dan SPP, tetapi juga pada pengelolaan dana berbasis solidaritas sosial. Hal ini sesuai argumentasi Gervas & Kambuga (2025), bahwa sistem akuntabilitas yang berfungsi tidak hanya berorientasi pada pengawasan vertical (pemerintah) tetapi juga harus memperhatikan pengawasan horizontal (masyarakat dan pemangku kepentingan lokal).

Maka praktik akuntabilitas keuangan di SD Islam Al Fatih Paguyangan menunjukkan keseimbangan antara tegulasi formal dan pendekatan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung utama. Keberhasilan ini dapat dijadikan model penerapan akuntabilitas bagi sekolah swasta lain yang memiliki kondisi serupa dalam hal sumber pendanaan dan tantangan sosial ekonomi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di SD Islam Al Fatih Paguyangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

akuntabilitas keuangan di sekolah SD Islam Al Fatih Paguyangan dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekolah menerapkan beragam mekanisme seperti pencatatan keuangan terstruktur, pelaporan keuangan rutin melalui rapat bulanan dan pertengahan tahun pelajaran serta pelaporan online melalui aplikasi ARKAS ke pemerintah. Serta keterlibatan komite sekolah dan wali murid dalam proses evaluasi serta transparansi penggunaan dana sosial dan sumbangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah melekat dalam tata Kelola keuangan sekolah.

Penerapan akuntabilitas di SD Islam Al Fatih Paguyangan tidak hanya terbatas pada kewajiban administratif, tetapi telah berkembang menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan mendorong kerlibatan aktif masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik atau masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan pendidikan yang menekankan pentingnya keadilan, efesiensi, transparansi dan partisipasi.

Dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga SD Islam Al Fatih Paguyangan mampu membangun sistem pertanggungjawaban keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga berintegritas secara sosial. Konteks pengelolaan dana pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi model inspiratif bagi sekolah-sekolah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita Alben. 2016. *Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi Arifin
- Asrul, H., Nianty, D. A. & Permatasari, Y. (2023). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS pada MIM Tamacinna*. Jurnal Manuver: Akuntansi dan Manajemen. <https://e-jurnal.nobel.ac.id>
- Gervas Flora & Yusuph Kambuga. (2025). *Pengaruh Kemahiran Teknologi di Kalangan Petugas Akuntansi Sekolah dalam Mengelola Dana Sekolah: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pilihan di Dewan Kota Dodoma dan Distrik Chamwino di*

- Tanzania. Journal of Research Innovation and Imolication in Education.*
<https://www.jriiejournal.com/wp-content/uploads/2025/06/JRIIE-9-2-092.pdf>
- Hermino, Agustinus. 2019. *Manajemen Kurikulum Berbasis Karater.* Bandung:Alfabeta.
- Indah Melati, Haryanto & Arifatin, F. W. (2024). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di MIM 05 Palirangan.* Jurnal Penelitian Ilmiah
[https://Multidisiplin.mail.jonedu.org+3ejournal.unibba.ac.id+3ejournal.com](https://Multidisiplin.mail.jonedu.org+3ejournal.unibba.ac.id+3ejournal.unibba.ac.id+3ejournal.com)
- Innanawati, Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansiterhadap Efektivitas BOS di SMK Negeri 1 Mojosongo.* Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis.
<https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.93>
- Musyarafah, S. (2024). *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di MTsN 1 Kota Banjarmasin.* Repository Unukase.
<https://repository.unukase.ac.id>
- Nugroho, H. S., Prasetyo, A., & Rahmawati, Y. (2023). *Model akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berbasis partisipatif di sekolah dasar.* Jurnal Manajemen Pendidikan, 15(1), 44–57.
<https://doi.org/10.21831/jmp.v15i1.59631>
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di SMA SASAMA.* Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA.
<https://ejournal.unibba.ac.id+1ejournal.unibba.ac.id>
- Sudyartini, S. & Wafa, Z. (2024). *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas BOS di Yogyakarta.* Journal on Education.
<https://mail.jonedu.org>
- Suhelayanti et al. 2020. *Manajemen Pendidikan.* Bandung: Yayasan Kita Menulis.

Somantri, M., & Salam, R. (2021).

Studi kasus akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(3), 512–526.

<https://doi.org/10.18202/jamal.2021.12.3.512>

Sukarman et al., 2021. *Teori Manajemen Pendidik.* Bandung: Yayasan Kita Menulis.

Undang-undang No. 20 tahun 2003. 2006. tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: DEPAG.

Weny Siska Yulia. (2024). *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMK Al-Huda Kota Kediri.* Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5 (1).

<https://doi.org/10.30762/joiem.v5i1.2443>